



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Jalan Veteran No. 11 Jakarta - 10110

Telepon : 021-3857611

Laman : www.ditjenpas.go.id

Email : kpbu.ditjenpas@kemenkumham.go.id / kpbu.ditjenpas@gmail.com

**PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI ULANG PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA PROYEK
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DAN KAWASAN/KEGIATAN KOMERSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: PAS1.PB.02.09-4487

Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBUP) Pembangunan Lembaga Pemasarakatan dan Kawasan/Kegiatan Komersial di Kabupaten Bojonegoro bermaksud untuk mengundang badan usaha nasional maupun asing untuk mengikuti Prakualifikasi Ulang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Pembangunan Lembaga Pemasarakatan dan Kawasan/Kegiatan Komersial di Kabupaten Bojonegoro ("**Proyek**").

Proyek ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana mengikuti ketentuan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama ("**PJPK**") melaksanakan proyek ini dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan *overcrowded* pada Lembaga Pemasarakatan di Provinsi Jawa Timur.

Proyek ini menggunakan skema pengembalian investasi yaitu pengelolaan Kawasan/Kegiatan komersial yang disediakan oleh PJPK. Ruang lingkup dari Badan Usaha Pelaksana adalah sebagai berikut:

1. Desain, Bangun, Mendanai, dan Serah bangunan Lembaga Pemasarakatan *medium security* dengan kapasitas 500 warga binaan pemsarakatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PJPK dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Mengelola lahan komersial kurang lebih 20 Ha yang disediakan oleh PJPK sebagai bentuk pengembalian investasi.

Perkiraan nilai investasi kurang lebih Rp 50 Miliar untuk bangunan Lembaga Pemasarakatan dengan masa kerja sama paling lama 50 tahun dengan 2 tahun masa konstruksi. Lokasi proyek berada di Desa Dander Kabupaten Bojonegoro dengan koordinat 7°12'57.7"S 111°51'41.3"E. Lokasi proyek dekat dengan rencana pembangunan jalan tol Ngawi-Bojonegoro-Tuban-Lamongan-Manyar-Bunder, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbang Kertausila, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Badan Usaha yang berminat berpartisipasi dalam Prakualifikasi Proyek dapat mengirimkan Surat Pernyataan Minat (*letter of interest*) beserta dokumen-dokumen yang disyaratkan sebagaimana disebutkan di bawah kepada Sekretariat Panitia Pengadaan secara elektronik melalui:

1. kpbu.ditjenpas@kemenkumham.go.id
2. kpbu.ditjenpas@gmail.com

Pengiriman Surat Pernyataan Minat dan pendaftaran dapat dilakukan pada hari kerja pada pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB, paling lambat pada tanggal 19 November 2021 Pkl 15.00 WIB.

Persyaratan untuk pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk bertindak atas nama badan usaha sesuai dengan anggaran dasar badan usaha atau kuasanya;
- b) Menyerahkan salinan bukti yang menunjukkan pihak yang berwenang mewakili badan usaha atau konsorsium badan usaha atau menyerahkan surat kuasa dari pihak yang berwenang (jika pengambilan Dokumen Prakualifikasi dilakukan melalui seorang kuasa);
- c) Menyerahkan anggaran dasar dan akta susunan direksi terkini badan usaha;
- d) Menyerahkan salinan kartu identitas (KTP) pemberi dan penerima kuasa;
- e) Menyerahkan Surat Pernyataan Minat (*Letter of interest*) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk bertindak atas nama badan usaha sesuai dengan anggaran dasar badan usaha atau kuasanya dan menginformasikan alamat surat elektronik resmi badan usaha; dan
- f) Pendaftar tidak boleh mewakili lebih dari satu badan usaha atau konsorsium badan usaha.

(secara bersama-sama disebut sebagai "**Dokumen Pendaftaran**")

Panitia Pengadaan akan mengirimkan Dokumen Prakualifikasi Proyek melalui surat elektronik setelah diterimanya Dokumen Pendaftaran secara lengkap.

Jakarta, 5 November 2021

**PANITIA PENGADAAN BADAN USAHA PELAKSANA
PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBUS)
PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN KAWASAN/KEGIATAN KOMERSIAL DI
KABUPATEN BOJONEGORO**